

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bagir Manan, 1986, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Armico.

-----, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH FH UII.

B. Hestu Cipto Handoyo, 2008, *Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Bayu Dwi Anggono, 2014, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2009, *Cara Praktis Menyusun & Mercancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis & Praktis disertai Manual) Konsepsi Teoritis menuju Artikulasi Empiris*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ishaq, 2007, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.

Maria Farida Indrati S, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya)*, Yogyakarta: Kanisius.

-----, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan I: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.

-----, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius.

Ni'matul Huda & R. Nazriyah, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Nusa Pedia.

Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: PT Kharisma Putra Utama.

Putera Astomo, 2018, *Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.

Satjipto Rahardjo 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Yusril Ihza Mahendra, 2002, *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia (Catatan dan Gagasan)*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan HAM RI.

Yuliandri, 2009, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

C. Jurnal dan Makalah Hukum

A. Hamid S. Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Disertasi, Universitas Indonesia, Fakultas Pascasarjana.

Any Ismayati, 2021, Pendekatan dan Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Pidana di Indonesia, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 12 Nomor 1.

- Antoni Putra, 2021, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Dalam Revisi Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 30 Nomor 2.
- Aprillia Jultje Saiya, Saartje Sarah Alfons, Heillen Martha Yosephine Tita, 2021, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 6.
- Arfiani, Syofirman Syofyan, Sucy Delyarahmi, Indah Nadilla, 2023, Urgensi Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Pagaruyuang Law Journal, Volume 6 Nomor 2.
- Asep Hidayat dan M. Irvanda, 2022, Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance, Hospitality, Volume 11 Nomor 1.
- Aulia Putri Gandari, Purwono Sungkono Raharjo, 2022, Penerapan Asas Keterbukaan Sebagai Perwujudan Elemen Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Volume 1 Nomor 3
- Belinda Putri Herawati dan Yohanes Suwanto, 2022, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Bagi Indonesia, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Volume 1 Nomor 2.
- Callychya Juanitha Raisha Tuhumena, Jemmy Jefry Pietersz, Victor Juzuf Sedubun, 2021, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 3.
- Cindy Rizka Tirzani Koesoemo, 2017, Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penanganan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, Lex Crimen, Volume 6 Nomor 1.
- Evi Noviawati, 2018, Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 6 Nomor 1.

- Fathorrahman, 2021, Pengaturan dan Implikasi Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, HUKMY : Jurnal Hukum, Volume 1 Nomor 2.
- Ferry Irawan Febriansyah, 2016, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perspektif, Volume 21 Nomor 3.
- Griadhi, Ni Made Ari Yuliantini, dan Anak Agung Sri Utari, 2008, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Kertha Patrika, Volume 33 Nomor 1.
- Harun Alrasid, 2003, Masalah Judicial Review, Jakarta, Makalah Disampaikan Dalam Rapat Dengar Pendapat Tentang Judicial Review.
- Heillen M Y Tita, 2014, Kajian Yuridis Tentang Problematika Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/UUP-IX/2011, SASI, Volume 20 Nomor 1.
- Hodio Potimbang, 2011, Faktor-faktor yang Melahirkan Peradilan Massa ditinjau dari Aspek Hukum Pidana, Majalah Varia Peradilan Nomor 302.
- Iza Rumesten, 2012, Moddel Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Jurnal Dinamika Hukum Volume 12 Nomor 1.
- Jalaluddin, 2011, Hakikat Dan Fungis Peraturan Perundang-Undangn Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik, Jurnal Aktualita, Volume 6 Nomor 3.
- Joko Riskiyono, 2015, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan, Aspirasi, Volume 6 Nomor 2.
- Kamarudin, 2017, Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang, Perspektif Hukum, Volume 15 Nomor 2.
- Machmud Aziz, 2009, Landasan Formil dan Materiil Konstitusional Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 6 Nomor 3.

- Moh. Fadhil, 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik Hukum Antikorupsi dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi, Al-Ahkam, Volume 15 Nomor 2.
- Mohamad Roky Huzaeni & Wildan Rofikil Anwar, 2021, Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Jurnal Dialekta Hukum, Volume 3 Nomor 2.
- Muhamad Khoirul Wafa, 2023, Peran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang, Siyasa Jurnal Hukum Tata Negara, Volume 3 Nomor 1.
- Nike K. Rumokoy, 2010, Tinjauan Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan, Jurnal Hukum Unsrat, Volume 18 Nomor 3.
- Philippus M. Hadjon, 1999, Keterbukaan Pemerintahan Dalam Mewujudkan pemerintahan Yang Demokratis (suatu Pemikiran dalam usaha meningkatkan perwujudan asas demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia), Pidato dalam rangka Lustrum III Ubhara Surya di Surabaya.
- Prastyo A. Wahidin S. & Supriyadi S., 2020, Pengaturan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 15 Nomor 2.
- Rahendro Jati, Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Responsif, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 3.
- Ridwan, 2004, Arti Penting Asas Keterbukaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN), Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 11 Nomor 27.
- Rokilah, Sulasno, 2021, Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2.
- Saifuddin, 2009, Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU, Jurnal Hukum Nomor Edisi Khusus Volume 16.

- Sirajul Munir, 2021, Asas Keterbukaan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Perspektif Islam dan Hukum Positif di Indonesia), *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 12 Nomor 12.
- Sofwan, 2022, Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, *Jatiswara*, Volume 37 Nomor 1.
- Widayati, 2017, Problem Ketidapatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 4 Nomor 1.
- Yusdianto, 2012, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah, *Jurnal Fiat Justitia*.
- Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, 2008, Sistem Seleksi Komisioner State Auxilliary Bodies (Suatu Catatan Analisis Komparatif), *Konstitusi* 1, Nomor 1.
- Zhaudiva Azzahra Putri & Rahayu Subekti, 2022, Teori Legislasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1 Nomor 1.

D. Internet

- Admin ACLC KPK, 2022, Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>.
- Admin BPHN, 2009, Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, https://bphn.go.id/data/documents/na_perbh_uu_10_2004.pdf.
- Admin DPR, Infografis Proses Pembuatan UU di DPR RI, <https://www.dpr.go.id/dokhumas/publication/Infografis-Proses-Pembuatan-UU-di-DPR-RI.pdf>.
- Antoni Putra, 2019, Tolak Revisi UU KPK, <https://pshk.or.id/blog-id/tolak-revisi-uu-kpk/>.

Ardito Ramadhan, 2021, Perjalanan Panjang Menolak Revisi UU KPK: Unjuk Rasa, Janji Perppu, Hingga Uji Materi <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/04/08295101/perjalanan-panjang-menolak-revisi-uu-kpk-unjuk-rasa-janji-perppu-hingga-uji>.

Donald Banjarnahor, 2019, Gercep! RUU KPK Inisiatif DPR 5 September Disahkan hari ini, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190917110955-4-99954/gercep-ruu-kpk-inisiatif-dpr-5-september-disahkan-hari-ini>.

Emi Styowati, dkk. 2017, *DRAFT 1: Konsep Paper Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Kebijakan Partisipatif*, dalam www.parlemen.net.

Indonesia Corruption Watch, 2016, Sejumlah Tokoh Menolak Revisi UU KPK, <https://antikorupsi.org/id/article/sejumlah-tokoh-menolak-revisi-uu-kpk>.

-----, 2016, Ini Upaya Revisi UU KPK Sejak Tahun 2010, <https://antikorupsi.org/id/article/ini-upaya-revisi-uu-kpk-sejak-tahun-2010>.

Lusiana Mustinda, 2019, Seputar Demo Mahasiswa Yang Tolak RUU KUHP dan Revisi UU KPK, <https://news.detik.com/berita/d-4714460/seputar-demo-mahasiswa-yang-tolak-ruu-kuhp-dan-revisi-uu-kpk>.

Sekretariat Jenderal DPR RI, Daftar Prolegnas DPR RI, <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnaslong-list>.

Tirto.id, 2019, Pengesahan Revisi UU KPK: Hanya 102 Anggota DPR yang Hadir, <https://tirto.id/pengesahan-revisi-uu-kpk-hanya-102-anggota-dpr-yang-hadir-eieB>

Yulida Medistiara, 2020, Di Sidang Gugatan UU KPK, Ahli Nilai Proses Pembentukan UU KPK Tergesa-gesa, <https://news.detik.com/berita/d-5066420/di-sidang-gugatan-uu-kpk-ahli-nilai-proses-pembentukan-uu-kpk-tergesa-gesa>.